

LPPD

Dinas Pariwisata Provinsi Banten



Tahun
2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

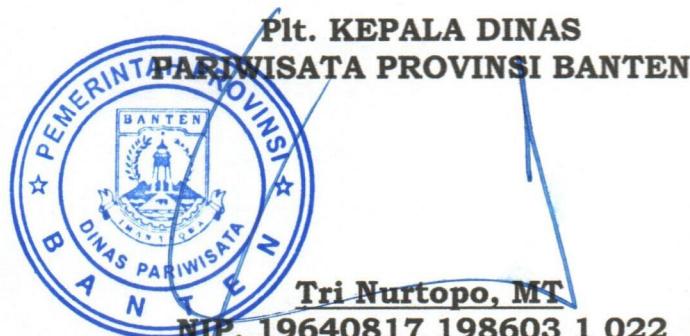
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada akhir tahun anggaran 2024 ini, Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah berhasil menyusun Bahan Laporan Penyelenggara Pemerintah (LPPD) Tahun 2024 di bidang Penyelenggaraan Urusan Pilihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Banten.

Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat menyelesaikan dan menyerahkan Bahan Laporan Penyelenggara Pemerintah (LPPD) Tahun 2024 sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama seluruh jajaran di Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Bahan Laporan Penyelenggara Pemerintah (LPPD) Tahun 2024 dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Banten khususnya pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten sehingga kedepan dapat lebih mempertajam kembali prioritas rencana Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Banten

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, Desember 2024



DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	3
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	5
b. Data Geografis Wilayah	7
c. Informasi Umum Data Kependudukan	7
d. Jumlah Kabupaten/Kota	8
e. Rincian Perangkat Daerah	10
f. Rincian Aparatur Sipil Negara	12
g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	15
h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan	22
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	63
1.1.3 Penerapan SPM	67

BAB II. CAPAIAN KINERJA DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

2.1 Capaian Kinerja Mikro	68
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	69
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	69
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	70
2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	71
a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja	71
b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja	77
c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya	83
d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah	84
e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan	85
f. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja	87

BAB III. CAPAIAN KINERJA TUGAS PELAKSANAAN PEMBANTUAN

1. Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan	97
2. Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi	97
3. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan	98
3.1 Tugas Pembantuann Pusat yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten	98
3.1.1 Target Kinerja	98
3.1.2 Realisasi	98
3.3 Permasalahan dan kendala	100
3.4 Saran dan Tindak Lanjut	100

BAB IV. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN

MINIMAL	101
----------------------	-----

BAB V. PENUTUP	102
-----------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Dinas Pariwisata Provinsi Banten dalam bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pelaksanaan Program kegiatan dan anggaran dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas tahun 2023-2026.

Dinas Pariwisata Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2024 berupaya merespon masukan, saran dan pendapat masyarakat yang termuat dari usulan program dan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance. Agar prinsip Good Governance dapat diimplementasikan dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah secara integral. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, profesionalisme, etos kerja dan moral yang tinggi. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab. Konsep dasar akuntabilitas adalah penjelasan managerial yang bertanggungjawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini berarti setiap aparatur Dinas Pariwisata bertanggung jawab

terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2024, Dinas Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan pada Peraturan Per-Undang-Undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 4) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.1.1 PENJELASAN UMUM

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 24 Tahun 2002, mengalami reorganisasi menjadi Dinas Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016. Kedudukan Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pariwisata yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata dan serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No. 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Tugas Pokok, Fungsi, Tipe dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pariwisata berdasarkan rencana strategis Dinas Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. membina bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. menetapkan kebijakan teknis pariwisata;
6. menetapkan rekomendasi teknis pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang pariwisata;
7. merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang destinasi pariwisata;
8. merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pemasaran produk pariwisata;
9. merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
10. merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
11. mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
12. merumuskan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja terkait;
13. menetapkan kebijakan sistem pengendalian internal;
14. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
15. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata;

16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

a. Undang – undang

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2024, Dinas Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan pada Peraturan Per-Undang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Banten terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Destinasi Pariwisata;
4. Bidang Pemasaran Produk Pariwisata ;
5. Bidang Pengembangan Industri dan Ekonomi Kreatif;
6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

B. Data Geografis Daerah

Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa

Pada Wilayah Administrasi di Provinsi Banten

KABUPATEN / KOTA	LUAS WILAYAH (Km2)	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN
1	2	3	4	5
Kabupaten				
1. Pandeglang	2.771,41	35	326	13
2. Lebak	3.312,18	28	340	5
3. Tangerang	1.027,76	29	246	28
4. Serang	1.469,91	29	326	
Kota				
1. Tangerang	178,35	13	0	104
2. Cilegon	162,51	8	0	43
3. Serang	265,79	6	0	66
4. Tangerang Selatan	164,86	7	0	54
	9.352,77	155	1.238	313

Sumber :

2020-2021 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019

2022: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.1-1-6117 tahun 2022 dan BPS

C. Informasi Umum Data Kependudukan

Berdasarkan data hasil sensus penduduk, penduduk Provinsi Banten menunjukkan jumlah yang terus meningkat setiap tahun, baik penduduk laki-laki maupun perempuan. Penduduk Banten tahun 2021 sebanyak 12.061.475 jiwa yang terdiri atas 12.061.475 jiwa penduduk laki-laki dan 5.914.331 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 - 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,76 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103,94. Kepadatan penduduk di Provinsi Banten tahun 2021 mencapai 1.248 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 8 kabupaten/kota cukup beragam

dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Tangerang dengan kepadatan sebesar 12.421 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Lebak sebesar 411 jiwa/Km².

D. Jumlah Kabupaten Kota

**Jumlah Kabupaten / Kota
di Provinsi Banten**

Kabupaten / Kota	JUMLAH	
	2023	2024
Pandeglang	1	1
Lebak	1	1
Tangerang	1	1
Serang	1	1
Kota Tangerang	1	1
Kota Cilegon	1	1
Kota Serang	1	1
Kota Tangsel	1	1
Jumlah	8	8

Sementara untuk kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari gambaran hasil pelaksanaan pembangunan yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi dan distribusi beberapa lapangan Pada tahun 2021, PDRB Provinsi Banten atas dasar harga berlaku sebesar 665,92 triliun rupiah. Tiga sector utama penyumbang PDRB Provinsi Banten terbesar adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 209,61 triliun rupiah (31,48%), disusul sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 85,90 triliun rupiah (12,90%) dan sektor Konstruksi sebesar 82,12 triliun rupiah (12,33%). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada tahun 2021 mencapai 4,44 % lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 (-3,39%) dan lebih lambat dibandingkan tahun 2019 (5,26%) Pada tahun 2021, wilayah dengan PDRB tertinggi yaitu Kota Tanggerang sebesar 150,33 triliun rupiah sedangkan Kabupaten Pandeglang merupakan wilayah dengan PDRB terendah yaitu sebesar 29,79 triliun rupiah. Apabila dilihat menurut lapangan usahnya, pada tahun 2021,

lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan sumbangan tertinggi sebesar 5,50 persen, kemudian disusul lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor sebesar 1,84 persen. Selanjutnya lapangan usaha Kontruksi menyumbang 10,81 persen dan lapangan usaha real estate memberikan sumbangan sebesar 3,00 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya secara keseluruhan menyumbang sebesar 4,44 persen.

Menurut berita resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Pada September 2023 terjadi inflasi year on year (oy) gabungan 3 kota sebesar 2,04 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,14. Inflasi oy tertinggi terjadi di kota Cilegon sebesar 2,47 persen dengan IHK sebesar 118,41. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks 11 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,18 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,34 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,52 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,81 persen; kelompok transportasi sebesar 1,46 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,30 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,25 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,19 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,16 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,87 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,56 persen.

E. Rincian Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 24 Tahun 2002, mengalami reorganisasi menjadi Dinas Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016. Kedudukan Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pariwisata yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata dan serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No. 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pariwisata berdasarkan rencana strategis Dinas Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- 3) membina bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- 4) mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) menetapkan kebijakan teknis pariwisata;
- 6) menetapkan rekomendasi teknis pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang pariwisata;
- 7) merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang destinasi pariwisata;
- 8) merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pemasaran produk pariwisata;
- 9) merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 10) merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 11) mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 12) merumuskan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja terkait;
- 13) menetapkan kebijakan sistem pengendalian internal;
- 14) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata dengan cara

membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- b. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata;
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

F. Rincian Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Dinas Pariwisata Provinsi Banten melalui pendidikan dan latihan mencapai 100 % dari total pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan.

Ketersediaan Aparatur pelaksana tugas pemerintahan dan tugas pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berjumlah 106 orang dengan komposisi sebagai berikut :

Komposisi dan Jumlah Personil

NO	URAIAN	JUMLAH	%
1	Pegawai Negeri Sipil	56	51.88
2	Pramubakti Administrasi	29	27.36
3	Satuan Pengaman	12	11.32
4	Kebersihan	7	6.6
5	Pengemudi	3	2.84
JUMLAH		106	100

Sumber : SIMPEG Provinsi Banten, 2023

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

NO.	JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	1	3	4

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

NO.	JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
4	Kepala Seksi/Subbag	-	-	10	5	15
5	Staf / Pelaksana	-	12	20	2	34
	JUMLAH	-	12	31	12	55
	% terhadap Jumlah Pegawai	-	21,82	56,36	21,82	100

Sumber : SIMPEG Provinsi Banten, 2023

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN						JUMLAH
		S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang/UPT	-	3	1	-	-	-	4
4	Kepala Seksi/Subbag	-	9	6	-	-	-	15
5	Staf / Pelaksana	-	4	15	8	-	7	34
6	Pramubakti Administrasi	-	2	12	-	1	14	29
	TOTAL	0	19	35	8	1	21	84
	% terhadap Jumlah Pegawai	0	22,62	41.7	9.52	1.2	25	100

Sumber : bagian kepegawaian dispar 2023

JENIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DIIKUTI S.D TAHUN 2024

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH
1	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	18
2	Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	3
3	Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah	7
4	Diklat Teknis Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Program Pembangunan	4
5	Diklat Analisis Gender	2
6	Diklat Kapasitas Kinerja	1
7	Diklat Dasar-Dasar Pelayanan Prima	2
8	Diklat Daya Saing Daerah	3
9	Diklat Teknis Kearsipan	6
10	Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah	11
11	Diklat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH
12	Diklat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1
13	Diklat Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1
14	Diklat Laporan Kinerja Keuangan Daerah	1
15	Diklat Penyusunan RENSTRA	2
16	Diklat Teknis Pengelolaan Barang	1
17	Diklat Penyusunan Laporan Keuangan	2
18	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	3
19	Diklat Tata Cara Penyusunan Renja SKPD	1
20	Diklat Manajemen Aset Daerah	1
21	Diklat Peningkatan Kinerja Staf	2
22	Diklat Penatausahaan Aset	4
23	Diklat PIM III	7
24	Diklat PIM IV	10
25	Diklat Teknis Penyusunan APBD	1
26	Diklat Kepariwisataan	1
27	Diklat Management Pengembangan Wisata Daerah	1
28	Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah	1
29	Diklat Penyusunan LAKIP	1
30	Diklat PPID	1
31	Diklat Teknis Penyusunan SKP	1
32	Diklat Penggerak Tunas Integritas	1
33	Diklat Pengelolaan Website	1
34	Diklat Teknis Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	1
35	Diklat Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Rumah Tangga Bagi Anggota Korpri Provinsi Banten	1
36	Diklat Management Data Pemerintahan Berbasis Spasial (GIS)	1
37	Bimtek LPPD	1
38	Bimtek SKP	1
39	Diklat teknis pengelolaan Barang Milik Daerah	1
40	Diklat Penggerak Tunas Integritas	6
41	Diklat Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual,	2
42	Diklat Standar Pelayanan Minimum	2
43	Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi PNS	2
44	Bimtek Penyimpan dan Pengurus Barang	1
45	Bimtek Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa	1
46	Bimtek TEPRA	1
47	Bimtek Penyusunan Analisa Jabatan	1
48	Bimtek Operator Administrasi Manajemen	2
JUMLAH		128

Sumber : bagian kepegawaian dispar 2023

G. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Dinas Pariwisata			
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19,947,612,900	17.820.954.473	89.34
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	127,340,000	112.771.688,	88,56
b	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55,110,000	51,209,267	92,92
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	6,500,000	6.166.162	94,86
d	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6,000,000	5,666,162	94,44
e	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6,000,000	5.666.163	94,44
f	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6,000,000	5,666,162	94,44
g	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18,240,000	16.504.574	90,49
h	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29,490,000	21.893.198	74,24
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15,807,424,000	14.037.525.439	88.80
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15,408,899,000	13.669.894.387	88.71
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	366,525,000	335.880.000	91.64
c	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6,000,000	5.931.246	98.85

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
d	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6,000,000	5,941,000	99.24
e	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,000,000	2,965,781	98.86
f	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6,000,000	5,965.781	99,43
g	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6,000,000	5.953.631	99.23
h	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5,000,000	4,980,513	99.61
3	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	2,000,000	1,518,750	75.94
a	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	500,000	339,875	67,98
b	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	500,000	339,875	67,98
c	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	500,000	419,500	83,90
d	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	500,000	419,500	83,90
4	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	44,500,000	39.974.375,	89,83
a	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	500,000	339,875	67,98
b	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	500,000	339,875	67,98
c	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	500,000	339,875	67,98
d	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15,000,000	13,000,000	86,67
e	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28,000,000	25.954.750	92,70

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
5	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	582,790,000	461.380.026	79,17
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,634,000	8,635,800	89,64
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	272,670,000	247.786.220	90,87
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31,540,000	19,593,846	62,12
d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43,964,000	38,250,000	87,00
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10,510,000	8,777,500	83,52
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164,807,000	90,751,000	55,07
g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3,000,000	2,835,830	94,53
h	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	46,665,000	44,749,830	95,90
6	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	205,137,000	190,950,000	93,08
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	205,137,000	190,950,000	93,08
7	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	2,630,921,900	2.509.558.782,	95,39
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	401,021,900	344.416.670	85,88
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,229,900,000	2,165,142,112	97,10
8	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	547,500,000	467.275.413	85.35
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	195,500,000	159.875.428	81.76
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175,000,000	166.091.804	94.91

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102,000,000	66.921.481	65.61
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75,000,000	74,386,700	99.18
II	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	20,739,843,200	20.044.349.055	96,65
1	<i>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi</i>	<i>6,400,610,000</i>	<i>6.249.189.400</i>	<i>97.63</i>
a	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	6,400,610,000	6.249.189.400	97.63
2	<i>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</i>	<i>11,147,500,000</i>	<i>10.827.211.365</i>	<i>97.13</i>
a	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	450,000,000	429,312,000	95.40
b	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3,000,000,000	2.971.681.870	99.06
c	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4,000,000,000	3.842.722.000	96.07
d	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3,697,500,000	3,583,495,495	96.92
3	<i>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</i>	<i>2,691,733,200</i>	<i>2.525.228.600</i>	<i>93.81</i>
a	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	741,010,000	632,820,000	85.40
b	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1,950,723,200	1.892.408.600	97.01
4	<i>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	<i>500,000,000</i>	<i>442.719.690</i>	<i>88.54</i>
a	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	200,000,000	175,311,040	87.66
b	Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar	300,000,000	267.408.650	89.14
III	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5,988,124,377	5,879,272,035	98.18

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	<i>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</i>	5,988,124,377	5,879,272,035	98.18
a	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3,388,124,377	3,333,844,098	98.40
b	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	500,000,000	476,547,615	95.31
c	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2,100,000,000	2,068,880,565	98.52
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1,400,000,000	1,249,975,420	89.28
1	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</i>	1,100,000,000	975,942,157	88.72
a	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	1,100,000,000	975,942,157	88.72
2	<i>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>	300,000,000	274,033,263	91.34
a	Perlindungan Hasil Kreativitas	150,000,000	143,775,000	95.85
b	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	150,000,000	130,258,263	86.84
5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2,504,700,000	2,400,946,079	95.86
1	<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</i>	2,004,700,000	1,918,006,977	95.68
a	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	200,000,000	194,639,945	97.32
b	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	1,304,700,000	1,236,391,419	94.76
c	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	500,000,000	486,975,613	97.40
2	<i>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</i>	500,000,000	482,939,102	96.59
a	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	200,000,000	193,435,688	96.72
b	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	300,000,000	289,503,414	96.50
	J U M L A H	50,580,280,477	47,395,497,562	93.70

Ket *) Data realisasi anggaran diperoleh dari LRA Keuangan per tanggal 31 Desember 2024

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Dari target realisasi anggaran sebesar Rp. 14.837.963.000 terealisasi sebesar Rp. 14.363.409.558 atau sekitar 96,80 % belum optimalnya capaian belanja tidak langsung (BTL) ini disebabkan ada 1 (satu) jabatan eselon II yang belum terisi dan diisi sementara oleh Pelaksana Tugas (plt) yang besaran tunjangan kinerja nya disesuaikan berdasarkan aturan dan perundang - undangan yang berlaku.

b. Belanja Langsung (BL)

Dari target realisasi anggaran sebesar Rp. 36.216.870.919,- yang terealisasi hanya Rp 35.742.317.477,- atau sekitar 98.69 %. belum optimalnya capaian belanja langsung (BL) ini disebabkan terdapat beberapa kegiatan yang penyerapannya dibawah 90 % yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kurang optimalnya penyerapan belanja kegiatan ini disebabkan adanya belanja transportasi pada perjalanan dinas per orang yang tidak dapat terserap secara maksimal mengingat pemberangkatan menggunakan biaya transportasi secara tim (bersama - sama) sehingga masih menyisakan uang transportasi monitoring dan evaluasi sisa per masing - masing orang pada sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kurang optimalnya penyerapan belanja kegiatan ini disebabkan adanya belanja tunjangan kinerja pada eselon II yang tidak dapat terserap secara maksimal mengingat jabatan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) sehingga biaya tunjangannya disesuaikan dengan besaran yang diberikan yaitu hanya 20 % dari tunjangan definitif Kepala Dinas.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Kurang optimalnya penyerapan belanja kegiatan ini disebabkan penggunaan biaya foto copy yang didasarkan kepada keperluan pelaporan rill yang hanya membutuhkan beberapa ratusan lembar sementara anggaran yang disediakan menyediakan ribuan lembar sehingga sisa penggunaan lembar foto copy tidak dipergunakan.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kurang optimalnya penyerapan belanja kegiatan ini disebabkan pengiriman pegawai untuk mengikuti kediklatan berbayar yang rencana awal yaitu 2 (dua) orang PNS namun kenyataannya hanya 1 (satu) orang

pegawai yang mengikuti kediklatan berbayar, Hal ini disebabkan permohonan yang masuk pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi hanya untuk 1 orang.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kurang optimalnya penyerapan belanja kegiatan ini disebabkan pembelanjaan kebutuhan perlengkapan rumah tangga kantor yang sebagian besar telah terpenuhi di Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kurang optimalnya penyerapan belanja kegiatan ini disebabkan penggunaan biaya foto copy yang didasarkan kepada keperluan pelaporan rill yang hanya membutuhkan beberapa ratusan lembar sementara anggaran yang disediakan menyediakan ribuan lembar sehingga sisa penggunaan lembar foto copy tidak dipergunakan.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kurang optimalnya penyerapan belanja kegiatan ini disebabkan kendaraan operasional baik roda dua maupun roda empat s.d triwulan III kondisi kendaraan terawat dengan baik sehingga sisa penggunaan anggaran dikembalikan ke kas daerah.

8. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Kurang optimalnya penyerapan belanja kegiatan ini disebabkan terdapat belanja peserta untuk 2 orang yang tidak dapat dipergunakan hal ini disebabkan 2 peserta tersebut tidak kunjungan memenuhi berkas kelengkapan administrasi pada saat kegiatan ini berlangsung.

9. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif

Kurang optimalnya penyerapan pada kegiatan ini disebabkan adanya belanja sewa booth, uang saku peserta dan belanja kelengkapan pendukung lainnya yang tidak dapat dibayarkan sesuai anggaran mengingat penggunaan booth cukup dengan ukuran tertentu sehingga lebih praktis dan efisien begitupun dengan pembelanjaan uang peserta yang diberikan berdasarkan kehadiran dan belanja lainnya yang disesuaikan berdasarkan penggunaan dilapangan.

H. PELAKSANAAN PROGRAM BERDASARKAN RENCANA REALISASI FISIK KEGIATAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan 2024	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan
1	2	3	4	5	6
	Dinas Pariwisata				
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100 Persen	<i>Kota Serang - Provinsi Banten</i>
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 Persen	<i>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kota Serang - Provinsi Banten</i>
b	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1. Tersusunnya 1 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah TA. 2025 2. Tersusunnya 1 Dokumen Dokumen Data Perangkat Daerah TA. 2025	<i>Kota Serang - Provinsi Banten</i>
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1. Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD 2025 2. Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2025	Kota Serang - Provinsi Banten
d	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1. Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2024 2. Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2024	Kota Serang - Provinsi Banten
e	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1. Tersusunnya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2025 2. Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2025	Kota Serang - Provinsi Banten
f	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1. Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2024 2. Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2024	Kota Serang - Provinsi Banten
g	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	12 Laporan	1. Tersusunnya Laporan Pemeringkatan Badan	Kota Serang - Provinsi Banten

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Publik/PPID 2024 2. Tersusunnya Laporan Perkin IKU Perubahan 2024 dan 2025 3. Tersusunnya Laporan RUP 2024 Perubahan dan 2024 4. Tersusunnya Laporan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender 2024 dan 2025 5. Tersusunnya Laporan Barang/Jasa SKPD 2024 6. Tersusunnya Laporan Bulanan 2024 7. Tersusunnya Laporan Triwulan 2024 8. Tersusunnya Laporan Semesteran 2024 9. Tersusunnya Laporan Tahunan PEP 10. Tersusunnya Laporan Kegiatan PEP 2024 11. Tersusunnya Laporan TEPRA SKPD 2024 12. Tersusunnya Data Sektoral Pariwisata 2024	
h	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	1. Tersusunnya Laporan SPIP 2024 2. Tersusunnya Laporan LKJIP 2024 3. Tersusunnya Laporan LKPJ 2024 4. Tersusunnya Laporan LPPD 2024 5. Tersusunnya Laporan SAKIP 2024 6. Tersusunnya Laporan Reformasi Birokrasi 2024	Kota Serang - Provinsi Banten
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Serang - Provinsi Banten
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen	1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN bulan Januari 2024 2. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN bulan Februari 2024 3. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN bulan Maret 2024 4. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN bulan April 2024 5. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN bulan Mei 2024 6. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN bulan Juni 2024 7. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN bulan Juli 2024 8. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN bulan Agustus 2024 9. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN bulan September 2024 10. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN bulan Oktober 2024	Kota Serang - Provinsi Banten

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
				<p>11. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN bulan November 2024</p> <p>12. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN bulan Desember 2024</p>	
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | **2024**

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1. Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASNbulan Januari 2024 2. Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASNbulan Februari 2024 3. Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASNbulan Maret 2024 4. Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASNbulan April 2024 5. Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASNbulan Mei 2024 6. Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASNbulan Juni 2024 7. Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASNbulan Juli 2024 8. Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASNbulan Agustus 2024 9. Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASNbulan September 2024 10. Tersusunnya Dokumen	<i>Kota Serang - Provinsi Banten</i>

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | **2024**

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
c	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1. Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD bulan Januari 2024 2. Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD bulan Februari 2024 3. Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD bulan Maret 2024 4. Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD bulan April 2024 5. Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD bulan Mei 2024 6. Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD bulan Juni 2024 7. Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD bulan Juli 2024 8. Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD bulan Agustus 2024 9. Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD bulan September 2024 10. Tersusunnya Dokumen	<i>Kota Serang - Provinsi Banten</i>

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
d	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
e	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Serang - Provinsi Banten
f	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	1. Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan semester 1 2. Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan semester 2	Kota Serang - Provinsi Banten
g	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1. Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan SKPD bulan Januari 2024 2. Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan SKPD bulan Februari 2024 3. Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan SKPD bulan Maret 2024 4. Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan SKPD bulan April 2024 5. Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan SKPD bulan Mei 2024 6. Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan SKPD bulan Juni 2024 7. Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan SKPD bulan Juli 2024 8. Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan SKPD bulan Agustus 2024 9. Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan SKPD bulan September 2024 10. Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan SKPD bulan Oktober 2024 11. Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan SKPD bulan November 2024 12. Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan SKPD bulan Desember 2024 13. Tersusunnya Laporan	Kota Serang - Provinsi Banten

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
h	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Serang - Provinsi Banten
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100 Persen	<i>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	Kota Serang - Provinsi Banten
a	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Tahun 2025	Kota Serang - Provinsi Banten
b	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Kartu Inventaris Ruangan (KIR)	Kota Serang - Provinsi Banten
c	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi BMD Aset dan Persediaan Tahun 2024	Kota Serang - Provinsi Banten
d	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Neraca Aset Tahun Anggaran 2024	Kota Serang - Provinsi Banten
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah</i>	100 Persen	<i>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Dalam dan Luar Provinsi Banten

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
a	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Kota Serang - Provinsi Banten
b	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg)	Kota Serang - Provinsi Banten
c	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Kota Serang - Provinsi Banten
d	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Terfasilitasinya Pengiriman Kursus Diklat Teknis/Kursus Singkat/Pelatihan	Bandung dan Bogor Provinsi Jawa Barat
e	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	103 Orang	Tersosialisasikannya Peraturan Perundang-Undangan	Kota Serang - Provinsi Banten
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah</i>	100 Persen	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Dalam dan Luar Provinsi Banten</i>
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Tersedianya Peralatan dan Alat Listrik	Kota Serang - Provinsi Banten
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1. Tersedianya 2 Paket Pengadaan Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran, ATK, Kertas dan Cover, Benda Pos, Bahan Komputer 2. Tersedianya 1 paket pengadaan makan minum rapat dan air minum pegawai	Kota Serang - Provinsi Banten
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dan Souvenir/Cinderamata	Kota Serang - Provinsi Banten
d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Serang - Provinsi Banten
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Makan dan Minum Jamuan Tamu	Kota Serang - Provinsi Banten
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1. Tersusunnya Laporan Fasilitasi Perjalanan Dinas Biasa 2. Tersusunnya Laporan Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Kota	Dalam dan Luar Provinsi Banten
g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Serang - Provinsi Banten
h	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Pembuatan Aplikasi Dawai Denofa	Kota Serang - Provinsi Banten
6	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>100 Persen.</i>	<i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Kota Serang - Provinsi Banten</i>
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	1. Tersedianya 2 unit Pemanas Air Listrik (Termos Water Boiler) 2. Tersedianya 5 unit Komputer PC 3. Tersedianya 1 unit Laptop 4. Tersedianya 12 unit Printer Warna F4	Kota Serang - Provinsi Banten

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
				5. Tersedianya 1 unit Scanner A3 6. Tersedianya 1 unit Scanner F4	
7	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100 Persen</i>	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Kota Serang - Provinsi Banten</i>
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Tersusunnya Laporan Pembayaran Tagihan Telpon dan Pembayaran Tagihan Listrik	Kota Serang - Provinsi Banten
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Tersusunnya Laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Serang - Provinsi Banten

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Serang - Provinsi Banten
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Serang - Provinsi Banten
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Serang - Provinsi Banten
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	152 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Serang - Provinsi Banten
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Serang - Provinsi Banten
II	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rata-Rata Lama inap Persentase Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata	1,72 Hari 100 Persen	*1,32 Hari <i>(data dari BPS Provinsi Banten per Oktober 2024)</i> 100 Persen	Provinsi Banten
1	<i>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi</i>	<i>Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi</i>	<i>100 Persen</i>	<i>100 Persen</i>	<i>Provinsi Banten</i>
a	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi				

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	23 Lokasi	1. Terlaksananya Pembangunan Landscape Destinasi Kampung Wisata Pipitan 2. Terlaksananya Pembangunan Homestay dan Landscape (Kolam Renang) Destinasi Ranga Wulung 3. Terlaksananya Pembangunan Landscape Destinasi Makam Kramat Wong Sagati 4. Terlaksananya Pembangunan Dekorasi Wisata Destinasi Pantai Ciantir 5. Terlaksananya Pembangunan landscape Destinasi Desa Cilebu 6. Terlaksananya Pembangunan Dekorasi Wisata Destinasi Ki Buyut Janir 7. Terlaksananya Pembangunan Gerbang Wisata Destinasi Desa Selapanjang 8. Terlaksananya Pembangunan Landscape Destinasi Hutan Jati Cianir 9. Terlaksananya Pembangunan Dekorasi Wisata Destinasi Ki Buyut Kaisah 10. Terlaksananya Pembangunan Gazebo Destinasi Sumur Debus 11. Terlaksananya Pembangunan Landscape Destinasi Desa Dangdang 12. Terlaksananya	1. Kampung Pipitan, Kec. Walantaka, Kota Serang 2. Desa Curugbitung, Kec. Curugbitung, Kabupaten Lebak 3. Desa Sajira Mekar, Kec. Sajira, Kabupaten Lebak 4. Pantai Ciantir, Desa Sawarna, Kec. Bayah, Kabupaten Lebak 5. Desa Cilebu, Pasirhaur, Kec. Cipanas, Kabupaten Lebak 6. Kec. Legok, Kabupaten Tangerang 7. Desa Selapanjang, Kec. Cisoka, Kab. Tangerang 8. Desa Cianir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang 9. Kec. Panongan, Kabupaten Tangerang 10. Cicalengka, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang 11. Desa Dangdang, kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang 12. Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang ⁴³ 13. Desa Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang 14. Kampung Gempol Kec. Pinang, Kota Tangerang 15. Desa Banyuresmi, Kec.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
2	<i>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</i>	<i>Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</i>	100 Persen	100 Persen	Provinsi Banten
a	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4 Dokumen	1. Tersusunnya DED Curug, Kota Serang - Gerem, Kota Cilegon - Citorek Timur, Kab. Lebak 2. Tersusunnya DED Kasunyatan, Kota Serang - Cirendeuy, Kab. Lebak - Hegarmanah, Kab. Lebak - Ciboleger, kab. Lebak 3. Tersusunnya DED Citangkil, Kota Cilegon - Cijengkol, Kab. Lebak - Sajira, Kab. Lebak 4. Tersusunnya DED Bayah Timur, Kab. Lebak - Cikatomas, Kab. Lebak - Muara, Kab. Tangerang	1. Curug Kota Serang - Gerem, Kota Cilegon - Citorek Timur, Kab. Lebak 2. Kasunyatan Kota Serang - Cirendeuy, Kab. Lebak - Hegarmanah, Kab. Lebak - Ciboleger, kab. Lebak 3. Citangkil, Kota Cilegon - Cijengkol, Kab. Lebak - Sajira, Kab. Lebak 4. Bayah Timur, Kab. Lebak - Cikatomas, Kab. Lebak - Muara, Kab. Tangerang
b	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	16 Unit	1. Terlaksananya Pembangunan Toilet Wisata Lima Umah Prapatan, Desa Curug, Kec. Curug, Kota Serang 2. Terlaksananya Pembangunan Dekorasi Wisata Kampung Wisata Sukadiri, Desa Kasunyatan, Kec. Kasemen, Kota Serang 3. Terlaksananya Pembangunan Dekorasi Wisata Kampung Kreasi Lukis Desa Citangkil, Kec. Citangkil, Kota Cilegon 4. Terlaksananya Pembangunan Aksesibilitas Destinasi Desa Citorek Timur , Kec. Cibeber, Kab. Lebak 5. Terlaksananya Pembangunan Aksesibilitas Destinasi Desa Cikatomas, Kec. Cilongrang, Kab. Lebak 6. Terlaksananya Pembangunan Aksesibilitas Destinasi Desa Cirendeuh, Kec. Cilongrang, Kab. Lebak 7. Terlaksananya Pembangunan Homestay Desa Hegarmanah, Kec. Cibeber, Kab. Lebak 8. Terlaksananya Pembangunan Jalur Pedestrian Desa Cijengkol, Kec. Cilongrang, Kab. Lebak 9. Terlaksananya Pembangunan Gazebo Situ Pasir Ayunan, Desa Sajira, Kec.	1. Curug, Kec. Curug, Kota Serang 2. Kasunyatan, Kec. Kasemen, Kota Serang 3. Citangkil, Kec. Citangkil, Kota Cilegon 4. Citorek Timur , Kec. Cibeber, Kab. Lebak 5. Cikatomas, Kec. Cilongrang, Kab. Lebak 6. Cirendeuh, Kec. Cilongrang, Kab. Lebak 7. Hegarmanah, Kec. Cibeber, Kab. Lebak 8. Muara, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang 9. Cijengkol, Kec. Cilongrang, Kab. Lebak 10. Sajira, Kec. Sajira, Kab. Lebak 11. Bayah Timur, Kec. Bayah, Kab. Lebak 12. Citangkil, Kec. Citangkil, Kota Cilegon 13. Bandung, Kec. Banjar, Kab. Pandeglang 14. Ciginggang, Kec. Gunung Kencana, Kab. Lebak 15. Muara, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang 16. Kelapa Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
c	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2 Lokasi	1. Terlaksananya Penataan Destinasi Situ Cikoncang, Kab. Lebak 2. Terlaksananya Penataan Destinasi Ciboleger, Kab. Lebak	1. Katapang, Kec. Wanásalam, Kab. Lebak 2. Bojongmenteng, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak
d	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	6570 Orang	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi melalui penyampaian materi Kebijakan Pariwisata, Sapta Pesona, dan Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan kepada 6.570 orang dengan rincian, 1. Kabupaten Lebak sebanyak 630 orang 2. Kabupaten Pandeglang sebanyak 720 orang 3. Kabupaten Serang sebanyak 720 orang 4. Kabupaten Tangerang sebanyak 1.980 orang 5. Kota Cilegon sebanyak 360 orang 6. Kota Serang sebanyak 270	1. Kabupaten Lebak 7 lokus 2. Kabupaten Pandeglang 8 lokus 3. Kabupaten Serang 8 lokus 4. Kabupaten Tangerang 22 lokus 5. Kota Cilegon 4 lokus 6. Kota Serang 3 lokus 7. Kota Tangerang 10 lokus 8. Kota Tangerang Selatan 11 lokus

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
				orang 7. Kota Tangerang sebanyak 900 orang 8. Kota Tangerang Selatan sebanyak 990 orang	
3	<i>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</i>	<i>Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</i>	<i>100 Persen</i>	<i>100 Persen</i>	<i>Provinsi Banten</i>
a	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi				

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
		Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi (2 Dokumen) 1. Masterplan Cilebu 2. Masterplan Kawasan Bayah	Kota Serang - Provinsi Banten
b	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	5 Lokasi	1. Terlaksananya Pembangunan Landmark dan Landscape Destinasi Pokdarwis Macan Ketawa 2. Terlaksananya Pembangunan Landmark dan Toilet Destinasi Desa Curug Goong 3. Terlaksananya Pembangunan Landmark dan Toilet Destinasi Desa Kadu Kempong 4. Terlaksananya Pembangunan Pedestrian Destinasi Bukit Si Nyonya 5. Terlaksananya Pembangunan Gazebo Destinasi Desa Mekarsari	1. Kacida Cibuntu, Desa Padarincang, Kec. Padarincang, Kabupaten Serang 2. Desa Curug Goong, Kec. Padarincang, Kabupaten Serang 3. Desa Kadu Kempong, Kec. Padarincang, Kabupaten Serang 4. Bukit Si Nyonya, Desa Bandung, Kabupaten Pandeglang 5. Desa Mekarsari, Kec. Cinangka, Kabupaten Serang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	Provinsi Banten Provinsi Banten
a	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah				
		Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	4 Usaha	Terlaksananya usaha yang dibina dan diawasi (4 Usaha)	1. Aula Dispar Provinsi Banten, Kota Serang - Provinsi Banten 2. Soll Marin Hotel dan Mall Living World, Kota Tangerang Selatan
b	Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar				

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
		Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	30 Usaha Pariwisata	Terlaksananya usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi (30 Usaha Pariwisata)	1. Pakons Prime Hotel, Kota Tangerang - Provinsi Banten 2. Swissbell in Hotel, Kabupaten Serang - Provinsi Banten 3. Soll Marin Hotel, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten 4. Horison Forbis Hotel, Kabupaten Serang - Provinsi Banten
III	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Jumlah Promosi Wisata Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	100 Persen 5 Persen	100 Persen 5 Persen	Provinsi Banten
1	<i>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</i>	<i>Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</i>	100 Persen	100 Persen	Provinsi Banten
a	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	1. Tersusunnya Dokumen Pengadaan Materi dan Sarana Promosi Pariwisata Banten berupa kumpulan aktivitas Promosi Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya, dokumen Calendar Of Event 2024, Leaflet, Pocket Map, souvenir baduy, miniatur kawasan masjid agung banten	Kota Serang, Kecamatan Curug, Sukajaya
				2. Tersusunnya Dokumen Pembuatan Materi Promosi Visual Pariwisata Banten berupa kumpulan aktivitas Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya, cetak billboard, media cetak harian, media cetak berkala, media online, Promosi di Tv nasional, media viral	Kota Serang, Kecamatan Curug, Sukajaya

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
			3. Tersusunnya Dokumen Sewa Billboard/Reklame/LED/Videotron yang dilaksanakan di 8 Kabupaten/Kota, Promosi di ASDP, Billboard KKB, Billboard Rest Area		Kota Tangerang - Provinsi Banten Kabupaten Tangerang - Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten Kota Cilegon, Kecamatan Pulomerak, Tamansari Kabupaten Pandeglang - Provinsi Banten Kabupaten Lebak - Provinsi Banten Kabupaten Serang - Provinsi Banten Kota Serang - Provinsi Banten
			4. Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dan Partisipasi Event Dalam Daerah dan Luar Daerah (Tingkat Nasional) melalui Mobil Hias MTQ Nasional, baliho, spanduk, umbul-umbul		Kota Samarinda, Kec.Samarinda Ulu, Karang Asem Kabupaten Tangerang - Provinsi Banten Kabupaten Lebak - Provinsi Banten Kabupaten Pandeglang - Provinsi Banten
b	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4 Dokumen	1. Tersusunnya Dokumen Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pariwisata Daerah / SIMPARDA 2. Tersusunnya Dokumen Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARD) 3. Tersusunnya Dokumen Penyusunan PDRB Pariwisata 4. Tersusunnya Dokumen Penyusunan Survey Indek Kepuasan Masyarakat	Kota Serang - Provinsi Banten Kabupaten Lebak, Kecamatan Cibeber, Cisungsang
c	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				
		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan		
				Terlaksananya kegiatan Promosi di Media melalui promo di media sosial Dinas Pariwisata Provinsi Banten oleh tim Online Campaign Specialis (OCS)	Kota Serang - Provinsi Banten
				1. Terlaksananya kegiatan Familiar Trip di Kota Serang dengan tema, Jaseng! Jalan – jalan di Kota Serang	1. Kota Serang
					2. Kabupaten Lebak
					3. Kabupaten Serang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
				<p>2. Terlaksananya kegiatan Familiar Trip di Kab. Lebak</p> <p>3. Terlaksananya kegiatan Familiar Trip di Kab. Serang</p> <p>4. Terlaksananya kegiatan Familiar Trip di Kab. Pandeglang</p>	4. Kabupaten Pandeglang
				<p>1. Terlaksananya kegiatan Partisipasi dan Penyelenggaraan Event berupa fasilitasi event Exciting Banten on Seba Baduy dan penyelenggaraan event Harvesting Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) Provinsi Banten Tahun 2024</p> <p>2. Terlaksananya partisipasi event pada kegiatan Exciting Ramadhan</p> <p>3. Terlaksananya partisipasi event Festival Desa Wisata Cikolelet</p>	<p>1. Kota Serang</p> <p>2. Kab. Tangerang</p> <p>3. Kabupaten Serang</p>

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Persentase Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif Provinsi Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	5.248.739 Rupiah 100 Persen	3.172.274 Rupiah 100 Persen	Dalam dan Luar Daerah
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	100 Persen	100 Persen	Dalam dan Luar Daerah
a	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	3 Dokumen	1. Terlaksananya fasilitasi dan partisipasi pameran produk kreatif dalam daerah pada event Seba Baduy, Festival Desa Wisata Cikolelet, Festival Seni Multatuli Lebak serta Trade Expo Indonesia 2024 2. Terlaksananya partisipasi pameran produk kreatif luar daerah pada kegiatan INACRAFT 2024 dan ITTIE 2024 3. Terlaksananya perlombaan ekonomi kreatif dan pameran produk ekraf sebagai pendukungan kegiatan BBI & BBWI	1. Kabupaten Lebak 2. Kabupaten Serang 3. Kabupaten Tangerang 4. DKI Jakarta 5. Jawa Barat

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
2	<i>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>	<i>Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>	100 Persen	100 Persen	Provinsi Banten
a	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	Terlaksananya Sertifikasi Halal Sebanyak 23 Sertifikat yang Terdiri Dari UKM Kuliner di 8 Kab/kota Provinsi Banten yang dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Pariwisata Provinsi Banten - kota Serang.	Provinsi Banten
b	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	20 Orang	Terlaksananya Sertifikasi HAKI Sebanyak 18 Sertifikat yang Terdiri Dari UKM Kuliner di 8 Kab/kota Provinsi Banten yang dilaksanakan di kota Serang.	Provinsi Banten
5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	100 Persen	100 Persen	Provinsi Banten
1	<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</i>	<i>Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</i>	100 Persen	100 Persen	Provinsi Banten

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
a	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	120 Orang	1. Tersertifikasinya 40 orang anggota Balawisata Banten di Hotel Wira Carita Kabupaten Pandeglang 2. Tersertifikasinya 40 orang Tour Leader anggota ASPI Banten yang dilaksanakan di Hotel Le Semar Karawaci Kota Tangerang 3. Tersertifikasinya 40 Orang Pemandu Wisata anggota HPI Banten di Villa Bumina Teteh Lewi Damar Kabupaten Lebak	1. Hotel Wira Carita Kabupaten Pandeglang 2. Hotel Le Semar Kecamatan Karawaci Kota Tangerang 3. Villa Bumina Teteh Kecamatan Lewidamar Kabupaten Lebak
b	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata				

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
			1834	<p>1. Terealisasinya 83 orang di Pemandian Cisolong Kab Pandeglang yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata</p> <p>2. Terealisasinya 83 orang di Kecamatan Juhut Kab Pandeglang yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata</p> <p>3. Terealisasinya 83 orang Forum Seni Rudat di Hotel Grand Krakatau Kota Serang yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata</p> <p>4. Terealisasinya 83 orang guru SMK Pariwisata di Hotel Sahid Mutiara Kab Tangerang yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata</p> <p>5. Terealisasinya 83 orang Genpi di Saba Back Yard Restoran Kota Serang yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata</p> <p>6. Terealisasinya 83 orang anggota ICN di Lansen Coffee and Ramen Kota Serang yang memperoleh Pemberdayaan</p>	<p>1. Pemandian Cisolong Kab Pandeglang</p> <p>2. Kecamatan Jiput kab Pandeglang</p> <p>3. Hotel Grand Krakatau Kota Serang</p> <p>4. Hotel Mutiara Sahid Kab Tangerang</p> <p>5. Saba Back Yard Resto Kota Serang</p> <p>6. Lansen Coffee and ramen Kota Serang</p> <p>7. Alun - alun Pandeglang</p> <p>8. Kampus Untirta Sindangsari</p> <p>9. Kafe Taman Kopi Kota Serang</p> <p>10. Desa Kubang Baros kab Serang</p> <p>11. Lembah Hijau Bandulu Anyer Kab Serang</p> <p>12. Cihunjuran Kab Pandeglang</p> <p>13. Desa Wisata Kacida Cibuntu Padarincang Kab Serang</p> <p>14. Politeknik Sahid Kota Tangerang Selatan</p> <p>15. Teras Unbaja Kota Serang</p> <p>16. Hotel Pesona Krakatau kab Pandeglang</p> <p>17. Vila Cimeunti Jiput Kab Pandeglang</p> <p>18. Hotel Horison UPI Kota Serang</p>

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
c	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	390 orang	<p>1. Terlaksananya kegiatan Pelatihan Kompetensi peaku ekraf kuliner bidang pastry 55 Orang di Hotel Le Semar Karawaci Kabupaten Tangerang</p> <p>2. Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Pengrajin Anyaman Bambu 55 Orang di Desa Banyuresmi Kec .Jiput Kabupaten Pandeglang</p> <p>3. Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Ekraf Sub Sektor Kriya (Kerajina Berenuk) 55 Orang di Rumah Makan Bebek Palka Kecamatan Cinangka Kabupataen Serang</p> <p>4. Terlaksananya Kursus Peatihan Kompetensi Pelaku Ekraf Sub Sektor Kriya 55 Orang di Hotel Sahid Mutiara Karawaci Kabupaten Tangerang</p> <p>5.Terlaksananya Pelatihan Kompetnsi Pelaku Ekraf Sub Sektor Kuliner Pembuatan Olahan Kerupuk 55 Orang di Aula Desa Wisata Kacida Cibuntu Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang</p> <p>6. Terlaksananya Pelatihan Bagi Pelaku Ekraf Sub Sektor Seni Pertunjukan 60 Orang di Hotel Pandeglang Raya Kabupaten Pandeglang</p>	<p>1.Hotel Le Semar Karawaci Kabupaten Tangerang</p> <p>2.Desa Banyuresmi Kec.Jiput Kabupaten pandeglang</p> <p>3. Rumah Makan Bebek Palka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang</p> <p>4. Hotel Sahid Mutiara Karawaci Kabupaten Tangerang</p> <p>5. Aula Desa Wisata Kacida Cibuntu Desa Padarincang Kabupaten Serang</p> <p>6. Hotel Pandeglang Raya Kabupaten Pandeglang</p>

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
2	<i>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	100 Persen	100 Persen	Provinsi Banten
a	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	180 Orang	1. Terlaksananya kegiatan Pelatihan Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fesyen 60 orang di Le Semar Hotel Kota Serang 2. Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pembuatan Content Creator Kreatif Bagi Pelaku Ekraf 60 Orang di Forbis Hotel Keramat Watu Kabupaten Serang 3. Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berbasis Multimedia Bagi Pelaku Ekraf 60 Orang di Hotel Nunia Tamansari Kota serang	1 Le Semar Hotel Kota Serang 2. Forbis Hotel Kabupaten Serang 3. Hotel Nunia Tamansari Kota Srang
b	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif				

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET, RENCANA DAN REALISASI, LOKASI KEGIATAN		
			Target 2024	Realisasi Output Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan
		Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi Kompetensi Pariwisata di Bidang Ekonomi Kreatif	150 orang	1. Tersertifikasinya 50 orang Pelaku Seni Pertunjukan Pengelola sanggar yang dilaksanakan di Hotel Pandeglang Raya Kabupaten Pandeglang 2. Tersertifikasinya 50 orang Pelaku Fashion yang ada di Provinsi Banten yang dilaksanakan di Hotel Le Semar Kota Serang 3. Tersertifikasinya 50 Orang Pelaku Usaha Kuliner (pastry) yang ada di Provinsi Banten yang dilaksanakan di SMKN 3 Kota Cilegon	1. Hotel Pandeglang Raya Kabupaten Pandeglang 2. Hotel Le Semar Kota Serang 3. SMK Negeri 3 Kota Cilegon

Capaian Kinerja Output Dinas Pariwisata sebesar **100 %**

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Berdasarkan RPD Provinsi Banten tahun 2023–2026, maka visi dan misi RPD, sebagaimana Provinsi Banten tahun 2023–2026 adalah:

“BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”

Sementara itu misi Provinsi Banten periode 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saling secara Merata dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa

Berdasarkan pada visi dan misi RPD Provinsi Banten 2023-2026, maka Dinas Pariwisata mendukung pelaksanaan misi tersebut (khususnya misi ke dua) sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Provinsi Banten. Selanjutnya dari Misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas Pariwisata Provinsi Banten menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi RPJPD

BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG MAJU DAN BERDAYA SAING SECARA MERATA DAN BERKEADILAN		
Permasalahan Pelayanan SKPD ^{*)}	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
Belum Optimalnya Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata	obyek wisata yang kurang/tidak memiliki daya tarik/unik dari obyek wisata di daerah lain.	kebijakan dan fasilitasi peningkatan nilai tambah destinasi dengan amenitas, fasilitas, dan atraksi yang aksesible
	obyek wisata yang menarik dan unik umumnya memiliki skala jangkauan yang kecil.	kebijakan dan fasilitasi peningkatan keragaman daya tarik melalui atraksi atau rekayasa kebijakan yang aksesible
	daya saing dan nilai obyek wisata yang lemah	kebijakan dan fasilitasi keterlibatan investasi, UMKMK, BUMD, PMDN, dan PMA, dan atau KPS
	pengelola destinasi yang belum profesional	kebijakan dan fasilitasi keterlibatan investasi, UMKMK, BUMD, PMDN, dan PMA, dan atau KPS
	belum lengkapnya fasilitas dan amenitas yang ada di daerah destinasi wisata	kebijakan dan fasilitasi penyediaan amenitas dan fasilitas di kawasan destinasi
	kurang optimalnya ketersediaan dan kelayakan fasilitas aksesibilitas menuju destinasi wisata	kebijakan dan fasilitasi penyediaan amenitas dan fasilitas di kawasan destinasi
Belum Optimalnya Promosi Pariwisata yang menarik wisatawan	ketidakefektifan berbagai regulasi yang menghambat pengembangan destinasi dengan dasar pembagian kewenangan atas urusan dan anggaran	kebijakan dan fasilitasi usulan yang bottom up dan lintas sektor untuk mengeliminasi masalah pembagian urusan dan anggaran
	Pemasaran dan atau promosi pariwisata yang diikuti skala internasional, nasional, regional, dan lokal lebih bersifat temporer, bukan bersifat sistemik	kebijakan dan fasilitasi sistem promosi dan pemasaran yang menyeluruh,
	keterbatasan materi pemasaran dan promosi pariwisata yang belum tepat sasaran	kebijakan dan fasilitasi materi promosi melalui KKL yang bersifat vertikal dan horizontal dengan pelibatan para pihak terkait
	Keterbatasan media pemasaran dan promosi pariwisata yang belum	kebijakan dan fasilitasi seleksi media yang efektif dan efisien

BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG MAJU DAN BERDAYA SAING SECARA MERATA DAN BERKEADILAN		
Permasalahan Pelayanan SKPD*	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
efektif	keterbatasan informasi sasaran dan target pemasaran	kebijakan dan fasilitasi materi promosi dan media promosi melalui pelibatan para pihak terkait yang bersifat vertikal dan horizontal.
Minimnya Sarana dan Prasarana peningkatan produk ekonomi kreatif	belum tersedianya roadmap ekonomi kreatif banten yang detail sebagai pemicu kreatifitas publik	kebijakan dan fasilitasi pembangunan roadmap ekonomi kreatif banten yang komprehensif, komunikatif, dan bertanggung jawab
	belum kompetitifnya dunia usaha ekonomi kreatif karena kelemahan data, informasi, dan publikasi	kebijakan dan fasilitasi terbentuknya motif ekonomis dan aktivitas kompetisi melalui berbagai forum secara proposional
	belum tersedianya lembaga yang mampu memfasilitasi perkembangan kemajuan ekonomi kreatif	kebijakan dan fasilitasi terbentuknya lembaga yang mampu memfasilitasi perkembangan ekonomi kreatif
	belum optimalnya partisipasi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam upaya peningkatan daya saing seperti sertifikasi	kebijakan dan fasilitasi terbentuknya event yang bersifat lomba dan kompetisi
Terbatasnya SDM Pariwisata dan Ekraf yang bersertifikat	belum adanya arah kebijakan pengembangan peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang partisipatif dan komunikatif sebagai pengembangan potensi masyarakat, khususnya di sekitar destinasi	kebijakan dan fasilitasi pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang partisipatif dan komunikatif
	homogenitas masyarakat di kawasan destinasi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lambat	kebijakan dan fasilitasi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi sosial sebagai entry point pengembangan sumberdaya manusia

Keterangan : Dinas Pariwisata Banten tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa fokus utama dari telaahan visi dan misi Provinsi Banten adalah **Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan**, dimana dapat diinterpretasikan bahwa urusan pariwisata merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk **meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi (gini rasio)** dan **pemeratan ekonomi (aksessibilitas**

ekonomi produktif), namun demikian perlu diperhatikan juga, bahwa dalam mengejawantahkan amanah tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Banten dibatasi ruang lingkup kewengangan yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014, yaitu meliputi sub urusan destinasi, pemasaran, ekonomi kreatif, dan sumberdaya manusia.

Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Banten dalam mendukung keberhasilan visi tersebut adalah :

1. Misi Kedua adalah Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan yang memiliki tujuan 'Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dengan sasaran Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2. Misi Keempat adalah Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa yang memiliki tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Dinas Pariwisata dan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, fungsi Dinas Pariwisata berada kedalam Urusan Pilihan Bukan Pelayanan Dasar, memiliki 5 (lima) Program yaitu:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3. Pemasaran Produk Pariwisata
4. Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
5. Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1.1.3 PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Dinas Pariwisata Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan terkait penerapan dan pencapaian SPM berdasarkan aturan dan perundang – undangan yang berlaku

BAB II**2.1 Capaian Kinerja Mikro****DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN**

Berikut ditampilkan target dan capaian IKU pada tahun 2023 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA 2023	CAPAIAN KINERJA 2024	PERUBAHAN (%) = (4/3*100%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	27.363.447	*19.410.605	70,94
2	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81,23	78,15	96,21

Keterangan :

*Jumlah kunjungan wisatawan data kunjungannya masih berjalan s.d tanggal 10 Januari 2025

Berdasarkan data tersebut capaian ini terlihat bahwa capaian kinerja indikator makro sebagai berikut :

1. Bahwa kunjungan wisatawan pada tahun 2024 jumlahnya lebih menurun, hal ini disebabkan data kunjungan wisatawan 2024 perolehan kunjungan wisatawan pada saat disampaikan laporan ini masih dalam proses (batas akhir pelaporan s.d tanggal 10 Januari 2025).
2. Terkait capaian SAKIP tahun 2024 perolehan angka pengukuran mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. hal ini disebabkan terdapat beberapa hasil penilaian indikator yang belum dapat memberikan keyakinan kepada evaluator untuk dapat diberikan nilai optimal.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

2.2 CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pilihan Pariwisata	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	78,15	Penilaian LHE SAKIP oleh APIP Inspektorat Provinsi Banten	Data capaian kinerja SAKIP di dapat dari pengukuran kinerja SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Banten (yang dituangkan dalam BA SAKIP Inspektorat) TA. 2023
	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	*19.410.605	Jumlah kunjungan wisatawan diperoleh dari SIMPARDAs https://simparda.bantenprov.go.id/ per tanggal 07 Januari 2024	Data kunjungan yang dikirim oleh perwakilan Dinas Pariwisata Kab/Kota di Provinsi Banten dari masing-masing destinasi wisata (angka sementara)	

Keterangan

*Jumlah Kunjungan Wisatawan merupakan angka sementara

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pilihan Pariwisata	A. Rata-Rata Lama Inap	1,32 Hari	BPS Perwakilan Banten	Angka Rata - rata lama inap diperoleh dari peroleh berita resmi statistik BPS Perwakilan Banten untuk periode s.d bulan Oktober 2024 (riliis Desember 2024)
	B. Rata-Rata Pengeluaran	Rp. 3.172.274	Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA)	SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2024	Diolah dari laporan kinerja Bidang SDM Pariwisata dan Ekraf (yang mendapatkan pelatihan, pembekalan hingga sertifikasi)
	C. Jumlah tenaga kerja yang terlatih di sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif	2624 Orang			
	D. Persentase Pengembangan Destinasi	20 %	SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2024	Diolah dari laporan kinerja bidang Destinasi Wisata (Penataan dan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Banten)	

2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

a. Target kinerja Perkin

Perjanjian Kinerja Eselon II (Kepala Dinas)

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	5
Sasaran Program					
1	Meningkatnya kompetensi sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Percentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Persen	100,00	100,00
Sasaran Kegiatan					
2	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Percentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persen	100,00	100,00
3	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Percentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	100,00	100,00
Sasaran Sub Kegiatan					
4	Terfasilitasnya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	100,00	120,00
5	Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	100,00	1.834,00
6	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	200,00	335,00
7	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	100,00	180,00
8	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang	100,00	155,00

Perjanjian Kinerja Eselon III (Sekretaris)

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	5
Sasaran Program					
1	Meningkatnya Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Percentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100,00	100,00
Sasaran Kegiatan					
2	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00
3	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00
Sasaran Sub Kegiatan					
4	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	2,00
5	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	2,00
6	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2,00	2,00
7	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2,00	2,00
8	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2,00	2,00
9	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12,00	12,00
10	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6,00	6,00
11	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	55,00	12,00
12	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	12,00
13	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	12,00
14	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12,00	12,00
15	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	1,00
16	Tersedianya Dokumen Bahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan	Dokumen	2,00	2,00

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan
17	Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	18,00	18,00
18	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1,00	1,00

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	5
Sasaran Program					
1	Meningkatnya Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata	Percentase Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata Rata-Rata Lama inap	%	100,00	100,00
2	Meningkatnya Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata		Hari	1,72	1,72
Sasaran Kegiatan					
3	Terkelolaanya Daya Tarik Wisata Provinsi	Percentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Perse	100,00	100,00
4	Terkelolaanya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Percentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Perse	100,00	100,00
5	Terkelolaanya Destinasi Pariwisata Provinsi	Percentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Perse	100,00	100,00
6	Terlaksananya Penetapan Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Percentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Perse	100,00	100,00
Sasaran Sub Kegiatan					
7	Terlaksananya Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Lokasi	19,00	24,00
8	Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	4,00	4,00
9	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Unit	12,00	16,00
10	Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Lokasi	2,00	2,00
11	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata	Orang	5.850,00	6.570,00

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan
12	Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Strategis Provinsi yang Dikembangkan			
13	Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	2,00	2,00
14	Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Lokasi	5,00	5,00
15	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021)Terjadinya konsistensi pelaksanaan standar CHSE	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi Jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	Usaha	4,00	4,00
			Usaha	30,00	30,00

Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	5
Sasaran Program					
1	Meningkatnya nilai tambah produk ekonomi kreatif	Persentase Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif Provinsi	%	0,00	0,00
2	Meningkatnya nilai tambah produk ekonomi kreatif	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	Rupiah	5.248.739,00	5.248.739,00
Sasaran Kegiatan					
3	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Perse	100,00	100,00
4	Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Perse	100,00	100,00
Sasaran Sub Kegiatan					
5	Meluasnya Akses Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Dokumen	3,00	3,00
6	Terlindungnya Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	1,00	1,00
7	Terlaksananya kegiatan konsultasi kekayaan intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	Orang	20,00	20,00

Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Pemasaran)

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	5
Sasaran Program					
1	Meningkatnya Informasi Pariwisata	Percentase Jumlah Promosi Wisata	%	100,00	100,00
2	Meningkatnya Informasi Pariwisata	Percentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	%	5,00	5,00
Sasaran Kegiatan					
3	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Percentase Ketercapaian Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Per센	100,00	100,00
Sasaran Sub Kegiatan					
4	Terlaksananya Penguanan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguanan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	4,00	4,00
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	4,00	4,00
6	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	3,00	3,00

Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Pengembangan SDM Parekraf)

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	5
Sasaran Program					
1	Meningkatnya kompetensi sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Percentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Per센	100,00	100,00
Sasaran Kegiatan					
2	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Percentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Per센	100,00	100,00
3	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Percentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Per센	100,00	100,00
Sasaran Sub Kegiatan					
4	Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	100,00	120,00

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan
5	Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	100,00	1.834,00
6	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	200,00	335,00
7	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	100,00	180,00
8	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang	100,00	155,00

Sumber Perjanjian Kinerja 2024 Perubahan

b. Pengukuran Kinerja dibandingkan dengan target Kinerja

Perjanjian Kinerja Eselon II (Kepala Dinas)

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
Sasaran Program					
1	Meningkatnya kompetensi sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Percentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Per센	100,00	100,00
Sasaran Kegiatan					
2	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Percentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Per센	100,00	100,00
3	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Percentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Per센	100,00	100,00
Sasaran Sub Kegiatan					
4	Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	120,00	120,00
5	Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	1.834,00	1.834,00
6	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	335,00	335,00
7	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	180,00	
8	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang	155,00	

Perjanjian Kinerja Eselon III (Sekretaris)

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	5
Sasaran Program					

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100,00	100,00
	Sasaran Kegiatan				
2	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00
3	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00
	Sasaran Sub Kegiatan				
4	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	2,00
5	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	2,00
6	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2,00	2,00
7	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2,00	2,00
8	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2,00	2,00
9	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12,00	12,00
10	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6,00	6,00
11	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	55,00	12,00
12	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	12,00
13	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	12,00
14	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12,00	12,00
15	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	1,00

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
16	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2,00	2,00
17	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	18,00	18,00
18	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1,00	1,00

Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Destinasi Wisata)

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	5
Sasaran Program					
1	Meningkatnya Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase Penataan dan Pengembangan Destinasi	%	100,00	100,00
2	Meningkatnya Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata	Rata-Rata Lama inap	Hari	1,72	1,32
Sasaran Kegiatan					
3	Terkelolaanya Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Perse	100,00	100,00
4	Terkelolaanya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Perse	100,00	100,00
5	Terkelolaanya Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Perse	100,00	100,00
6	Terlaksananya Penetapan Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Perse	100,00	100,00
Sasaran Sub Kegiatan					
7	Terlaksananya Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Lokasi	24,00	24,00
8	Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	4,00	4,00
9	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Unit	12,00	16,00

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
10	Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Lokasi	2,00	2,00
11	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Orang	5.850,00	6.570,00
12	Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	2,00	2,00
13	Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Lokasi	5,00	5,00
14	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Usaha	4,00	4,00
15	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) Terjadinya konsistensi pelaksanaan standar CHSE	Jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	Usaha	30,00	30,00

Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	5
Sasaran Program					
1	Meningkatnya nilai tambah produk ekonomi kreatif	Percentase Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif Provinsi	%	0,00	0,00
2	Meningkatnya nilai tambah produk ekonomi kreatif	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	Rupiah	5.248.7 39,00	3.172.274
Sasaran Kegiatan					
3	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Percentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Perse	100,00	100,00
4	Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Percentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Perse	100,00	100,00
Sasaran Sub Kegiatan					
5	Meluasnya Akses Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Dokumen	3,00	3,00
6	Terlindunginya Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	1,00	1,00

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
7	Terlaksananya kegiatan konsultasi kekayaan intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	Orang	20,00	20,00

Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Pemasaran)

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	5
Sasaran Program					
1	Meningkatnya Informasi Pariwisata	Percentase Jumlah Promosi Wisata	%	100,00	100,00
2	Meningkatnya Informasi Pariwisata	Percentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	%	5,00	5,00
Sasaran Kegiatan					
3	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Percentase Ketercapaian Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Perse	100,00	100,00
Sasaran Sub Kegiatan					
4	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	4,00	4,00
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	4,00	4,00
6	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	3,00	3,00

Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Pengembangan SDM Parekraf)

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	5
Sasaran Program					
1	Meningkatnya kompetensi sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Percentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Perse	100,00	100,00
Sasaran Kegiatan					
2	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Percentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Perse	100,00	100,00

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
3	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	100,00	100,00
Sasaran Sub Kegiatan					
4	Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	120,00	120,00
5	Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	1.834,00	1.834,00
6	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	335,00	335,00
7	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	180,00	180,00
8	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang	155,00	155,00

c. Pengukuran capaian kinerja (IKU) dibandingkan dengan tahun sebelumnya;

Sasaran / Program <i>1</i>	Indikator Kinerja <i>2</i>	Satuan <i>3</i>	Realisasi	Realisasi	Percentase
			2023 <i>4</i>	2024 <i>5</i>	
Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	Jumlah	25.664.013	19.410.605	75,63 %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai	81.25	78,15	96,18 %

d. pengukuran capaian kinerja (IKU) dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Sasaran / Program <i>1</i>	Indikator Kinerja <i>2</i>	Satuan <i>3</i>	Realisasi <i>5</i>	Target Akhir RPJMD	Percentase <i>6</i>
				2024 <i>4</i>	
				2023 <i>7</i>	
Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	Jumlah	19.410.605	23.223.025	83,58 %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai	78,15	80,00	97,69 %

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan

Belanja Tidak Langsung (BTL)

Dari target realisasi anggaran sebesar Rp. 14.837.963.000 terealisasi sebesar Rp. 14.363.409.558 atau sekitar 96,80 % belum optimalnya capaian belanja tidak langsung (BTL) ini disebabkan ada 1 (satu) jabatan eselon II yang belum terisi dan diisi sementara oleh Pelaksana Tugas (plt) yang besaran tunjangan kinerja nya disesuaikan berdasarkan aturan dan perundang - undangan yang berlaku

Belanja Langsung (BL)

Dari target realisasi anggaran sebesar Rp. 36.216.870.919,- yang terealisasi hanya Rp 35.742.317.477,- atau sekitar 98.69 %. Efisiensi belanja ini dipengaruhi oleh beberapa kegiatan yaitu ;

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyerapan belanja kegiatan ini terkait belanja transportasi pada perjalanan dinas yang awalnya direncanakan per orang namun pada saat pelaksanannya biaya transportasi dipergunakan secara tim (bersama - sama) sehingga efisiensi penggunaan uang transportasi monitoring dan evaluasi sisa per masing - masing orang pada sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah.

2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Penyerapan belanja kegiatan ini telah dilakukan efisiensi terhadap penggunaan biaya foto copy yang didasarkan kepada keperluan pelaporan rill sehingga dapat menghemat beberapa ratusan lembar kertas yang disediakan menyediakan sehingga terdapat efisiensi terhadap penggunaan lembar foto copy.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pembelanjaan kebutuhan perlengkapan rumah tangga kantor yang sebagian besar masih dapat dipergunakan sehingga terdapat efisiensi pada kebutuhan perlengkapan rumah tangga kantor ini

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyerapan belanja kendaraan operasional baik roda dua maupun roda empat s.d triwulan III kondisi kendaraan terawat dengan baik sehingga sisa penggunaan anggaran dikembalikan ke kas daerah.

5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif

Penyerapan pada kegiatan ini berupa belanja kelengkapan pendukung dibayarkan sesuai dengan penggunaan anggaran sehingga lebih praktis dan efisien dan bagi pemberian uang saku peserta yang diberikan berdasarkan kehadiran

f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Secara umum analisis yang mendukung keberhasilan terkait program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini berdasarkan sasaran, rencana dan realisasi serta keterangan yang dapat menjadi gambaran atas analisis dukungan terhadap target kinerja :

NO	URUSAN	OPD	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROG/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
1	PILIHAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Mancanegara)	21.063.968	19.410.605	Data Kunjungan wisatawan merupakan angka sementara dan akan dilakukan penyempurnaan pada tanggal 10 Januari 2025 oleh penginput data kunjungan wisatawan Kab/Kota	akan dilakukan penyempurnaan pada tanggal 10 Januari 2025 oleh penginput data kunjungan wisatawan Kab/Kota
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP (Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	70	78,15	Tidak ada	Tidak ada
				Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya dokumen/laporan Perencanaan, Penganggaran,	24 Laporan	24 Laporan		

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

NO	URUSAN	OPD	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROG/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen/laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46 Laporan	46 Laporan		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen/laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan		
				Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen/laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan		
				Administrasi	Tersedianya	12 Laporan	12 Laporan		

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

NO	URUSAN	OPD	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROG/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Umum Perangkat Daerah	dokumen/laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22 Unit	22 Unit		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	24 Laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188 Unit	188 Unit		
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI	Persentase Pengembangan Destinasi Wisata berbasis	20 %	20 %	Tidak ada	Tidak ada

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

NO	URUSAN	OPD	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROG/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				PARIWISATA	Sapta Pesona Rata - Rata Lama Inap	1.72	1.30	Pehitungan lama inap ini untuk periode bulan November 2024, Sementara untuk perhitungan lama inap Bulan Desember 2024 akan dirilis kembali oleh BPS Perwakilan Banten sekitar Bulan Januari 2025 mendatang	Berkoordinasi dengan BPS Perwakilan Banten terkait data lama inap yang terbaru
				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Terlaksananya pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	24 Lokasi	24 Lokasi		
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya pengelolaan kawasan strategis Pariwisata Provinsi	2 Kawasan	2 Kawasan		
				Pengelolaan Destinasi Wisata Provinsi	Tercapainya Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	5 Lokasi	5 Lokasi		

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

NO	URUSAN	OPD	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROG/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				'Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tercapainya Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	34 Unit Usaha	34 Unit Usaha		
				Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan (5 %) Kunjungan	5	5	Tidak ada	Tidak ada
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tercapainya Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	11 Kegiatan	11 Kegiatan		
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	Rp. 5.248.739	Rp. 3.172.274	Ketidakcapaian ini disebabkan adanya faktor	Melakukan upaya kegiatan di dalam ruangan (diluar

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

NO	URUSAN	OPD	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROG/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				cuaca yang menyebabkan wisatawan lebih sedikit berkunjung ke Provinsi Banten sehingga rata - rata pengeluaran jadi berkurang	kawasan wisata alam) sebagai antisipasi dalam rangka memitigasi pengaruh faktor cuaca bagi wisatawan yang berkunjung ke Banten
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Tercapainya Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	3 Dokumen	3 Dokumen		
				Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Tercapainya Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1 Dokumen		
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	<i>Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisataan dan Ekonomi</i>	100 %	100 %	Tidak ada	Tidak ada

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2024

NO	URUSAN	OPD	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROG/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					Kreatif (100 %)				
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Tercapainya Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	400 Orang	400 Orang		
				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Tercapainya Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	200 orang	200 orang		

Selain itu, antisipasi situasi dan kondisi teknis pelaksanaan yang adaptif sehingga meskipun terdapat kekurangan baik secara spesifikasi non teknis maupun teknis, PPTK dan Pembantu PPTK mampu beradaptasi dan mencapai tujuan dari taget kegiatan/ sub kegiatan dengan baik.

Analisis ketercapaian kinerja sasaran pertama “Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)” adalah sebagai berikut :

1. Prosentase capaian diangka 92,15 % dimana angka ini merupakan angka sementara yang terkumpul berdasarkan data kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara dari Kab/Kota yang dilaporkan ke Dinas Pariwisata Provinsi Banten s.d tanggal 7 Januari 2025
2. Dibandingan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kunjungan belum dapat disandingkan apakah meningkat atau menurun sebab angka kunjungan tahun 2024 masih akan mengalami peningkatan
3. Ketercapaian kunjungan wisatawan ini tentunya dipengaruhi oleh adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun pihak swasta, pokdarwis dan masyarakat Banten yang telah mengoptimalkan peran dan fungsi masing – masing
4. Terdapat program suistanable development goals (SDG's) pada sector pariwisata yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata dapat dijalankan dengan baik oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagaimana yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Bidang Destinasi Pariwisata.
5. Berjalannya output seluruh aktifitas program dan kegiatan sehingga pencapaian kinerjanya dapat dirasakan tidak hanya oleh pemangku kepentingan melainkan juga wisatawan yang berkunjung ke Banten

Analisis ketercapaian kinerja Sasaran kedua “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan” keberhasilannya dipengaruhi oleh hal – hal sebagai berikut :

1. Pada saat dilakukan penilaian oleh APIP terpenuhinya seluruh
2. komponen penilaian SAKIP dengan peroleh skor 78.15 % dari target 70.00 % sehingga capaiannya mencapai 111,64 %
3. Terpenuhinya komponen atau nilai indikator pada setiap aspek perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan penilaian kinerja yang dilakukan oleh evaluator SAKIP Inspektorat.
4. Adannya *tools* yang disediakan oleh Bappeda dan BKD seperti penggunaan system manajemen pengukuran kinerja (SIKAP) oleh BKD Banten mempermudah para Middle manager (PPTK) melakukan pemantauan dan pengawasan terkait pekerjaan harian yang umumnya terhubung dengan kegiatan baik sebagai kinerja penunjang maupun pendukung sehingga efektifitas pengawasan berjalan baik dan hal tersebut serta adanya penilaian kinerja program/kegiatan yang terakomodir dalam Sistem Informasi Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah (SIMAKIP) berdampak terhadap performa kinerja serta lebih akuntabel
5. Berjalanannya core ASN value yang ditandai dengan lebih disiplinnya para pegawai dalam melaksanakan pekerjaan serta mampu mempedomani nilai – nilai dalam ASN Berakhkal tersebut.
6. Adanya pedoman pelaksanaan kegiatan yang dapat dipedomani oleh aparatur pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan, pengelolaan asset serta perencanaan dan pelaporan memudahkan para aparatur dalam melaksanakan kegiatannya.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-040.01.4.640022/2024 tanggal 24 bulan November tahun 2023.

2. Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi

Latar Belakang

Dana dekonsentrasi adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendanai program dan kegiatan yang terkait dengan tugas pembantuan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengalokasikan dana dekonsentrasi kepada Provinsi Banten untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah tersebut.

Tujuan

Tujuan dana dekonsentrasi Kemenparekraf ke Provinsi Banten adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi wisata.
2. Mengembangkan ekonomi kreatif melalui industri pariwisata.
3. Meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat.
4. Mengembangkan infrastruktur pariwisata.

INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

SATUAN KERJA YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN

Satker yang melaksanakan tugas tersebut adalah Dinas Pariwisata Provinsi Banten, yang terbagi kedalam beberapa bidang diantaranya :

1. Bidang Pemasaran dalam Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
2. Bidang SDM Pariwisata dan Ekraf dalam kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata
3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dalam kegiatan

Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata

3. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

3.1. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKUKAN OLEH DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

3.1.1 Target Kinerja

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	PROGRAM KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	1.200.000.000
1	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	200.000.000
2	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF	200.000.000
3	PENGEMBANGAN TATA KELOLA DESTINASI PARIWISATA	300.000.000
4	PENGEMBANGAN PENYELENGGARA KEGIATAN (EVENT)	500.000.000
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	130.000.000
1	PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	130.000.000
TOTAL ANGGARAN		1.330.000.000

3.1.2 REALISASI KINERJA

A. RENCANA DAN REALISASI OUTPUT KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA		REALISASI	
	TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT	%	TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT	%
1	2	3	4	5
Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	100			100
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan	100	Terlaksananya Pelatihan untuk Pembekalan Kerja kepada 30 orang SDM Pariwisata	100
Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	SDM Ekraf yang memperoleh Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif	100	Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif kepada 30 orang	100
Pengembangan	Pengembangan	100	Terlaksanya 1 kali	100

Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional		kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional (SISPARNAS)	
Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	Fasilitasi Pendukungan Event Daerah	100	Terlaksananya 2 kali kegiatan Fasilitasi Pendukungan Event Daerah	100
Program Pendukungan Manajemen				
Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	Administrasi Tugas Pembantuan	100	Tersedianya Penyelenggaraan Administrasi Tugas Pembantuan 1 daerah bagi ASN Dinas Pariwisata Provinsi Banten (prov,kab/kota)	100

B. RENCANA DAN REALISASI KEUANGAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA (RP)	REALISASI (RP)	%
1	2	3	4	5
I	Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	1.200.000.000	1.153.773.587	96.15
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	200.000.000	191.295.000	95.65
2	Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	200.000.000	189.087.400	94.54
3	Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	300.000.000	287.878.187	95.96
4	Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	500.000.000	485.513.000	97.10
II	Program Pendukungan Manajemen	130.000.000	110.404.414	84.93
5	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	130.000.000	110.404.414	84.93

Capaian kinerja keuangan adalah 95.05 %

Hambatan / Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas pembantuan dan Upaya Penyelesaian

3.3 PERMASALAHAN DAN KENDALA

Berikut kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dana pembantuan :

1. Surat Keputusan Gubernur atas penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran agak terlambat sehingga pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dari jadwal yang sudah direncanakan.
2. Dua kali pergantian user dan SK atas KPA satuan kerja dipenghujung tahun anggaran dimana pada saat tersebut sudah ada rencana kegiatan yang harus segera dilaksanakan.

3.4 SARAN DAN TINDAKLANJUT

Berikut saran dan tindaklanjut dalam pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi :

1. Agar selalu berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten terkait Surat Keputusan Gubernur atas penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran agak tidak ditemukan kembali keterlambatan proses penerbitannya sehingga pelaksanaan kegiatan dapat menyesuaikan dari jadwal yang sudah direncanakan.
2. Agar selalu berkoordinasi dengan Direktorat Jendral Perbendaharaan KPKN terkait rencana pergantian user dan SK atas KPA satuan kerja agar tidak terjadi keterhambatan pada proses pelaksanaan kegiatannya.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimana pada pasal 4 dijelaskan bahwa jenis SPM terdiri atas :

- a. Pendidikan
- b. Pekerjaan Umum
- c. Kesehatan
- d. Perumaha Rakyat
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial

Sementara urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan urusan pilihan Sesuai Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sehingga Dinas Pariwisata Provinsi Banten adalah urusan Pilihan dan tidak diwajibkan atau **tidak memiliki SPM** dalam menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tersebut.

BAB V PENUTUP

Penyusunan LPPD Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun anggaran 2024 sebagai bentuk atas laporan pelaksanaan tugas yang diemban oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi Banten yang melaksanakan urusan pilihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran pelaksanaan 2024.

Seluruh pelaksanaan kegiatan baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN berjalan dengan baik, selanjutnya kami harapkan koreksi atau masukan terhadap penyempurnaan teknis penyusunan laporan serta pelaksanaan kegiatan sebagai upaya perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga apa yang kami sajikan ini dapat memberikan gambaran akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Provinsi Banten.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2024 disusun berdasarkan aturan dan perundang – undangan yang berlaku.

Serang, Desember 2024

